



LAPORAN PENILAIAN

**Mengenai keprihatinan dari komunitas dan masyarakat sipil yang ke dua kalinya
mengeluh atas aktifitas-aktifitas yang dijalankan oleh Perusahaan-perusahaan
Kelompok Wilmar di Indonesia**

Oktober 2009

October 2009

Kantor Penasehat Ombudsman

Perusahaan Finansiil Internasional
Agen Garansi Multilateral Investasi

www.cao-ombudsman.org

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan	ii
1. Pengantar.....	1
2. Penilaian.....	3
3. Langkah-langkah selanjutnya.....	12

DAFTAR SINGKATAN

BACP	Program Biodiversitas dan Hasil-Hasil Pertanian
CAO	Kantor Penasehat Ombudsman
CPO	Minyak Kelapa Sawit yang masih belum disaring
CSO	Organisasi Masyarakat Sipil
ESIA	Penilaian Dampak Sosial dan lingkungan
FOE	Teman-teman dari Bumi
GEF	Fasilitas Lingkungan Global
IFC	Perusahaan Finansial Internasional
MIGA	Agen Garansi Multilateral Investasi
RSPO	Konperensi Meja Bundar mengenai bagaimana melanggengkan penggunaan Minyak kelapa Sawit
SAD	Suku Anak Dalam (Komunitas suku asli di Propinsi Jambi)
SPI	Ringkasan dari Usulan Investasi

1. PENGANTAR

CAO adalah suatu mekanisme mandiri yang diulang-ulang untuk IFC dan untuk MIGA dari Kelompok Bank Dunia. CAO langsung bertanggung-jawab untuk melapor kepada Presiden dari pada Kelompok Bank Dunia, dan surat perintahnya ialah membantu untuk menanggulangi keluhan-keluhan dari orang-orang yang terpengaruh oleh proyek-proyek dalam suatu cara yang adil, obyektif, dan konstruktif serta memperluas hasil-hasil sosial dan lingkungan di mana IFC dan MIGA memainkan suatu peranan. Begitu ada keluhan, fungsi dari Ombudsman CAO adalah menjawab keluhan tersebut.

Dokumen ini mengetengahkan suatu ringkasan dari penilaian, dan mengajukan usulan-usulan langkah-langkah berikutnya kepada semua pihak.

1.1 Keluhan

Pada tanggal 19 Desember 2008, CAO menerima suatu keluhan dari kelompok-kelompok komunitas yang diwakili oleh enam organisasi masyarakat sipil: Program Orang-Orang dari Hutan, Sawit Watch, Setara, Lembaga Gemawan, dan Kontak Rakyat Borneo. Mereka prihatin mengenai dampak lingkungan dan sosial yang mereka percayai disebabkan oleh karena aktifitas-aktifitas terus menerus yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan kelompok Wilmar, suatu klien dari IFC (Annex-1). Kelayakannya ditentukan pada tanggal 14 Januari 2009.

Keluhan ini berhubungan dengan dampak-dampak stok berantai pada komunitas-komunitas di Indonesia sebagai suatu akibat dari suatu proyek pemrosesan minyak kelapa sawit di Ukraina. Proyek ini adalah sebuah investasi yang disetujui oleh Dewan IFC pada tanggal 23 Oktober 2008. Para pengeluh mencatat bahwa IFC menyetujui proyek ini sedangkan Ombudsman CAO serta Proses Kepatuhan sudah berjalan dalam hubungannya dengan keluhan sebelumnya yang berhubungan dengan investasi dari kelompok Wilmar.

Secara khusus, para pengeluh mengidentifikasi masalah-masalah berikut ini::

1. Konflik-konflik Sosial disebabkan oleh karena pembukaan tanah tanpa persetujuan yang selayaknya dari komunitas atau proses-proses analisa dampak lingkungan yang diselenggarakan secara tuntas.
2. Patuh kepada peraturan-peraturan/hukum-hukum nasional serta kepada protokol-protokol sertifikat dari perjanjian Meja Bundar dari Minyak Kelapa Sawit yang berkelanjutan.
3. Patuh kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan IFC, prosedur-prosedur dan syarat-syarat due diligence. .

Para pengeluh mengetengahkan analisa mendetail dari keprihatinan-keprihatinan mereka serta referensi silang mengenai keluhan-keluhan mereka yang dulu kepada CAO. Mereka mendaftar beberapa perusahaan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatra di mana mereka percaya bahwa komunitas-komunitas lokalnya telah mengalami dampak-dampak ini. Sebagai tambahan, para pengeluh mengusulkan hal-hal berikut ini, sebagai hasil-hasil yang mau mereka lihat, dari pada keluhan-keluhan mereka:

- perubahan-perubahan cara bagaimana IFC menerapkan garansi investasinya dan dukungan-dukkungan lain kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di rantai stok minyak kelapa sawit;
- *Tindakan korektif terhadap staf IFC yang telah melanggar prosedur-prosedur dan standar-standar IFC;*
- *Suatu tinjauan kembali terhadap prosedur-prosedur operasional IFC untuk meyakinkan bahwa mereka menghormati hukum-hukum RSPO;*
- *Suatu tinjauan kembali yang mandiri dan parsipatif atas operasi-operasi dari perusahaan-perusahaan kelompok Wilmar di Indonesia;*
- *Aksi-aksi untuk meyakinkan bahwa Wilmar dan IFC mengambil tindakan perbaikan untuk meredakan atau membenahi kerugian rinci dan memberi kompensasi kepada mereka yang kehidupannya dan lingkungannya sudah dirusak tanpa bisa diperbaiki lagi.*

1.2 Proyeknya

Kelompok Wilmar adalah sebuah konglomerat agrobisnis besar yang mengkhususkan dalam produksi dan berbisnis minyak kelapa sawit, beroperasi di Asia, Eropa Timur dan Afrika. Sejak tahun 2003, IFC telah membuat empat investasi di Kelompok Wilmar.

Delta-Wilmar CIS, suatu kilang minyak kelapa sawit dan pabrik mentega tiruan dan klien1 IFC sekarang di Ukraina, akan menambah kapasitasnya dan investasinya dalam infrastruktur yang berkaitan di pabrik mereka dekat pelabuhan Yuhny di daerah Odessa. Delta-Wilmar CIS secara keseluruhannya dimiliki oleh Delmar Perseroan Terbatas yang berbasis di Singapura, yang 50:50 kerja sama antara sponsor proyek utama: Wilmar International Limited dan Delta Exports Pte. Limited. Delta Export adalah pedagang komoditas besar yang berbasis di Singapura khususnya di Negara-negara CIS. Jumlah total biaya diperkirakan sekitar \$235 juta. Investasi IFC yang diusulkan adalah \$45 juta. Suatu pinjaman dari rekening IFC sendiri. Proyek ini terletak di suatu zona industri dekat Pelabuhan Laut Hitam Yuzhny di daerah Odessa.

IFC memberi definisi pinjaman ini sebagai kategori proyek B.

2. PENILAIAN CAO

Masalah-masalah yang dibangkitkan dalam keluhan-keluhan ini juga sudah diidentifikasi oleh para pengeluh di keluhan mereka yang pertama kepada CAO pada bulan Juli 2007. Walaupun demikian, keluhan kedua ini disampaikan suatu argumentasi bahwa masalah-masalah ini sangatlah luas letak geografisnya, tersebar ke seluruh mata rantai stok dari kilang minyak Delta Wilmar, dan mempengaruhi beberapa komunitas di Indonesia sebagai tambahan dari masalah-masalah yang dulunya sudah diidentifikasi di keluhan yang pertama. Keluhan yang baru mengidentifikasi beberapa hasil yang diinginkan yang keduanya termasuk hal-hal yang sistematis serta khusus.

Wakil Presiden dari CAO, dengan identitasnya sendiri, menginstruksikan bahwa proyek Delta Wilmar (No 26271) diteliti untuk diudit. Penelitian itu dimulai di permulaan bulan Desember 2008 dan termasuk kebijaksanaan dan keprihatinan prosedur yang timbul dari keluhan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa audit untuk IFC adalah sangat diperlukan.

2.1. Proses Penilaian, Peserta, Daftar Perjalanan dan tindak lanjut

Karena banyak sekali jumlah perusahaan dan komunitas yang terdaftar di keluhan itu, langkah pertama dari proses penilaian ialah mendapatkan informasi dari orang-orang yang bertanda-tangan mengenai keprihatinan-keprihatinan yang khusus. Melalui tanya jawab dan kontak telepon, CAO ingin menyusun – untuk setiap lokasi - sifat khusus masalahnya/keprihatinannya, dan identitas dari anggota-anggota komunitas di setiap kasus. Tanya jawab ini dikirim ke para penanda-tangan dan menghubungkan para peserta (melalui email dan komunikasi telepon) antara bulan Februari – Mei tahun 2009.

Tabel 1 berikut ini memperlihatkan tindakan, jawaban, dan tindak lanjutnya.

Tabel 1. Penandatanganan/Peserta, Aksi CAO, Jawaban, dan tindak lanjut

No.	Nama/tanda-tangan	Institusi	Aksi CAO	Jawaban	Tindak lanjut
1	Leily Khairnur	Lembaga Gemawan	Tanya-jawab, email, komunikasi tilpon,	Prihatin tapi responnya terbatas.	Tidak ada ulasan yang konkrit.
2	Adriani Zakaria	Kontak Rakyat Borneo	Tanya-jawab, email, komunikasi tilpon	Prihatin	Rapat, Tabel Informasi
3	Shaban Stiawan	WALHI Kalimantan Barat	Tanya-jawab, email, komunikasi tilpon	Prihatin tapi responnya terbatas.	Tidak ada ulasan yang konkrit.
4	Nordin	Selamatkan Borneo kita	Tanya-jawab, email, komunikasi tilpon	Prihatin tapi responnya terbatas.	Tidak ada ulasan yang konkrit.
5	Norman Jiwan	Sawit Watch	Tanya-jawab, email, komunikasi tilpon	Prihatin.	Rapat-rapat dan diskusi
6	Edi Sutrisno (Gun)	Sawit Watch	Tanya-jawab, email, komunikasi tilpon	Prihatin.	Rapat-rapat, diskusi, dan Tabel Informasi
7	Agus Winarno Boyce	WALHI Sumatera Barat	Tanya-jawab, email, komunikasi tilpon	Prihatin.	Informasi singkat
8	Yuliusman	WALHI Sumatera Selatan	Tanya-jawab, email, komunikasi tilpon	Prihatin.	Informasi singkat
9	Ahmad Zazalia	Naikkan Riau	Tanya-jawab, email, komunikasi tilpon	Prihatin.	Informasi singkat, diskusi fokus kelompok (FGD)
10	Rukaiyah Roffiq	Setara, Jambi	Tanya-jawab, email, komunikasi tilpon	Prihatin.	Informasi singkat, diskusi fokus kelompok(FGD)

Ulasan konkrit diterima dari 6 penanda-tangan seperti terlihat di Tabel 2

Tabel 2. Informasi yang diterima oleh CAO dari para penanda-tangan

No:	Penanda-tangan	Institusi	Tanggal informasi diterima oleh CAO	Kasus Propinsi
1	Adri	Kontak Rakyat Borneo, Kalimantan Barat	9 Maret 2009.	Kalimantan Barat
2	Rikaiyah Roffiq	Setara, Jambi	10 Maret 2009	Jambi
3	Ahmad Zazalia	Naikkan, Riau	20 Maret 2009	Riau
4	Gun	Sawit Watch	22 Maret 2009	Sumatra Barat
5	Boyce	WALHI Sumatera Barat	6 April 2009.	
6	Yuliusman	WALHI Sumatera Selatan	7 April 2009.	Sumatra Selatan

CAO dan beberapa penanda-tangan/peserta selanjutnya bertemu melalui diskusi-diskusi fokus kelompok berikut ini.

Tabel 3. Jadwal Rapat dan diskusi Fokus Kelompok.

No.	Rapat-rapat, Diskusi Fokus Kelompok	Tanggal
1	Rapat dengan Kontak Rakyat Borneo, di Bogor	7 Februari 2009
2	Rapat dengan Sawit Watch, di Bogor	9 Maret 2009
3	FGD di Jambi dengan SETARA, Kelompok-kelompok CSOs lokal dan SAD	19 Maret 2009
4	FGD di Pekanbaru – Riau dengan Naikkan Riau, kelompok-kelompok CSOs dan Pangean lokal.	4 April 2009
5	Rapat dengan Naikkan Riu dan Setara di Pekanbaru, Riau	13 April 2009

Di dalam diskusi fokus kelompok, para peserta termasuk kelompok-kelompok komunitas dan CSO yang berkaitan lainnya. Walaupun demikian, dalam kasus Jambi dan Riau, ada lebih banyak wakil dari anggota-anggota komunitas seperti terlihat di tabel 4.

Tabel 4. Peserta-peserta lain yang ikut memberikan kontribusinya di kasus Jambi dan Riau.

No.	Nama	Institusi	Daerah-daerah
1	Wakil Kelompok Komunitas Kenegerian Pangean	Orang-orang penting dari Komunitas Kenegerian Pangean	Riau
2	CSO lokal di Riau	Lestari Negeri, LBHI, IPPERPA, WWF Pekanbaru, Bunga Bangsa, KAR, Yayasan Kabut	Riau
3	Wakil-wakil kelompok komunitas SAD	Yamabu dan Mat Ukup	Jambi
4	CSOs Lokal di Jambi	Warsi, WALHI Jambi, YLBHL, AMPHAL	Jambi

Karena sedikitnya respon dari Kalimantan, pada tanggal 17 April 2007, CAO mengirimkan surat yang kedua kepada para penanda-tangan meminta partisipasi mereka dan memberikan informasi lebih lanjut mengenai keluhan mereka, namun tidak ada informasi tambahan yang diterima lagi dari para penanda-tangan.

2.2 Temuan-temuan

Di Propinsi Kalimantan Barat, 8 perusahaan Wilmar diidentifikasi dalam keluhan itu, telah mendapatkan tanah tanpa persetujuan dari komunitas dan melaksanakan permukiman secara tidak sukarela, membuka lahan hutan untuk perkebunan, menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati dan sumber-sumber alami, dan berdampak pada warisan budaya masyarakat adat. Berdasarkan respon dari CSO, terhadap permintaan CAO untuk mendapatkan informasi, CAO tidak bisa mendapatkan informasi apa saja dari keprihatinan-keprihatinan ini pada waktu laporan ini ditulis.

Di Propinsi Kalimantan Tengah, 15 perusahaan dari PT PBB telah diidentifikasi dalam keluhan itu, telah mengadakan transaksi pembelian tanah tanpa persetujuan komunitas dan melaksanakan permukiman secara tidak sukarela, membuka lahan hutan untuk perkebunan, menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati dan sumber-sumber alami, dan berdampak pada warisan budaya masyarakat adat. Walaupun demikian, CAO tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari para pengeluh mengenai komunitas-komunitas mana yang terpengaruh.

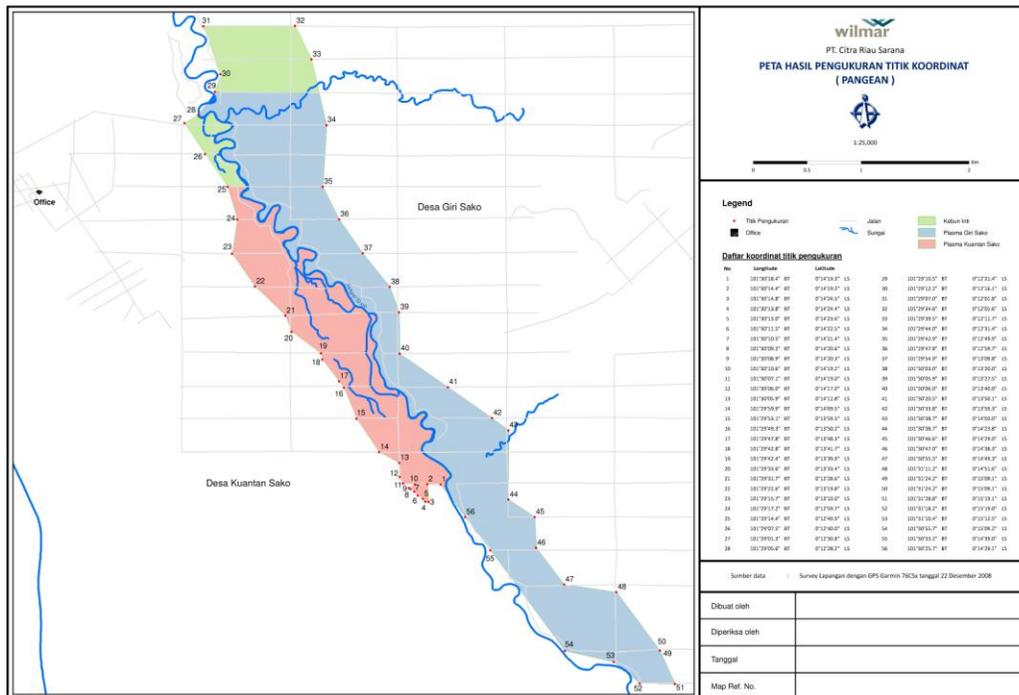
Di Propinsi Riau, 2 perusahaan Wilmar diidentifikasi dalam keluhan itu, bahwa mereka ada keprihatinan yang sama seperti yang diidentifikasi di Kalimantan. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh CSO lokal, Naikkan Riau, hanya 1 perusahaan Wilmar, PT Cipta Riau Sarana (CRS), telah dikonformasikan mempunyai keprihatinan-keprihatinan sehubungan dengan persetujuan komunitas untuk mendapatkan tanah. Perusahaan ini tidak terdaftar dalam surat para penanda-tangan pada bulan Desember 2009.

Tabel 5. Perusahaan-perusahaan Wilmar di Propinsi Riau

No.	Nama Perusahaan-perusahaan	Daerah Perkebunan Kelapa Sawit	Kapasitas Kilang	Lokasi
1	Cipta Riau Sarana	Inti: 1000ha. Pemegang Saham kecil: 6000 ha	2 kilang	Daerah Pangean
2	Sinar Siak Dian Permai	Inti: 1400ha		Daerah Siak dan Pelalawan
3	Siak Prima Sakti	Inti: 40 ha	1 kilang, 45 ton/jam	Daerah Siak
4	Industri Kayu Murini Sam Sam dan Murini	Setiap Perkebunan Intinya 3237 ha dan 9473 ha	2 kilang di Zona Industri Dumai	Daerah Bengkalis
5	Sinar Perdana Caraka	Tidak ada	1 kilang, 45 ton/jam	Daerah Rohil
6	Dharma Wungu Guna	Inti: 4374 ha	1 kilang, 30 ton/jam	Daerah Bengkalis
7	Bukit Kapur Reksa	Tidak ada	4000 ton/hari	Kabupaten Dumai
8	Wilmar Bio-Energy			Kabupaten Dumai
9	Karya Prajona Nelayan	500ha	Tidak diketahui	Daerah Kampar
10	Sentana Adidaya Perkasa			Memonopoli pengimporan pupuk

Sumber: Naikkan Riau, 2009.

Pada tahun 2005, Wilmar mengambil alih PT CRS dari perusahaan lokal. Wilmar mewarisi suatu masalah yang menyangkut klaim dari kelompok komunitas Kenegerian Pangean atas tanah seluas 583 hektar yang telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Ada klaim tumpang-tindih antara perusahaan, komunitas, dan para transmigran yang diberi bagian sedikit dari perkebunan di daerah tersebut pada tahun 1980 an. Pada saat ini, ada suatu proses pemecahan masalah yang sedang berjalan antara CRS dan Komunitas Pangean yang sedang ditangani oleh CSO Naikkan Riau.



Gambar 1. Peta dari tanah yang dipermasalahkan oleh Komunitas Kenegerian Pangean dan Perusahaan Wilmar, CRS di Propinsi Riau (Sumber: Perusahaan CRS, 2009)

Di Jambi, salah satu penanda-tangan dari pada keluhan ke CAO mengetengahkan keprihatinan-keprihatinan yang khusus, mengenai suatu perdebatan lokal antara suatu perusahaan yang baru saja didirikan oleh perusahaan Wilmar di Propinsi Jambi, nama perusahaan itu ialah AMC dengan komunitas-komunitas lokal. AMC terdiri dari bermacam-macam perusahaan minyak kelapa sawit termasuk Asiatic Persada Co. yang bukan hanya perkebunan tapi juga kilang. Hak-hak guna tanah dari perkebunan ini meliputi sekitar 20,000 hektar.

Pada saat ini ada suatu inisiatif untuk menyelesaikan masalah tanah antara Asiatic Persada Co dengan Kelompok Komunitas SAD Sungai Bahar (Kelompok Mat Ukup dan kelompok Yamabu) yang melibatkan Setara Foundation sebagai pemberi fasilitas.

Di **Sumatra Barat dan Sumatra Selatan**, Teman-teman dari Bumi menyediakan informasi kepada daftar CAO beberapa perkebunan dan komunitas-komunitas yang mereka percayai sedang mengalami konflik. CAO tidak bisa mengkonformasikan kejadian-kejadian ini pada waktu menyelesaikan laporan ini, namun telah memberitahukan kepada Wilmar mengenai informasi ini.

Tabel 5. Perusahaan-perusahaan Wilmar yang terdaftar di dalam surat keluhan ke dua kepada CAO berlawanan dengan Perusahaan-perusahaan Wilmar yang dilaporkan oleh para penanda-tangan selama Penilaian ke dua.

Propinsi	Perusahaan-perusahaan Wilmar yang terdaftar di Surat keluhan ke dua kepada CAO.		Perusahaan-perusahaan Wilmar yang dilaporkan oleh Para penanda-tangan selama Penilaian ke dua.	
	Nama Perusahaan	Keluhan-keluhan	Nama Perusahaan	Keluhan-keluhan
Landak, Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> • PT Agropalindo Sakti • PT Agro Nusa Investama • PT Pratama Prosentindo • PT Perkebunan Anak Negeri Pasaman • PT Indoresin Putra Mandiri • PT Daya Landak Plantation • PT Pelindo Sakti • PT Bumi Pratama Kathulistiwa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan tanah dan permukiman secara tidak sukarela • Koservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber-sumber alami yang terus menerus • Masyarakat adat dan warisan budaya 	Sambas; <ul style="list-style-type: none"> • PT Agronusa Investama • PT Wilmar Sambas Plantation 	Kepatuhan dengan hukum EIA
Seruwan, Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • 15 perusahaan dari PT PPB 		Tidak ada	Tidak ada kaitannya
Dumai, Riau	<ul style="list-style-type: none"> • PT Bukit Kaporeksa • PT Murini Samsam 		<ul style="list-style-type: none"> • PT Citra Riau Sarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan tanah dan permukiman secara tidak sukarela
Jambi	Tidak tersedia		Tidak ada keluhan	<ul style="list-style-type: none"> • PT Asiatik Persada

2.3 Masalah-masalah structural dan sistematis

CAO mengetahui bahwa masalah-masalah yang dibangkitkan oleh kasus-kasus ini adalah tidak unik terjadi di tempat-tempat yang diidentifikasi dalam keluhan ini dan merefleksikan suatu keprihatinan yang lebih luas dan struktural yang berkaitan dengan hubungan antara orang dan tanah. Meskipun ada beberapa daerah yang lebih berhasil dari pada daerah lain, dalam tugasnya mengatasi keprihatinan-keprihatinan ini, menurut pengalaman CAO, konflik yang ada hubungannya dengan tanah juga dialami secara meluas di seluruh Indonesia. Sebagian besar, konflik ini terjadi karena di kebanyakan hal batas-batas tanah di dalam dan di antara komunitas tidak jelas. Yang lebih penting lagi, kelihatannya proses dan prosedur untuk mendapatkan ijin yang benar untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit tidak jelas, terutama untuk penanam modal/operator atau anggota-anggota komunitas lokal. Dua factor yang menambah kesulitan hal ini:

1. Kekurangan kejelasan antara agen-agen lokal, propinsi dan nasional untuk memberikan alokasi tanah untuk perkebunan kelapa sawit, dan
2. Kekurangan definisi dari peranan-peranan yang sesuai dari tuan tanah tradisional/pengguna tanah dalam proses perijinan.

Kecenderung untuk terjadi konflik bertambah dalam komunitas-komunitas, tapi juga antara komunitas-komunitas dan perusahaan-perusahaan. Keadaan-keadaan ini memungkinkan adanya tantangan-tantangan struktural untuk penanam modal swasta serta komunitas-komunitas, dan membuat implementasi dari standard-standard kinerja lingkungan dan sosial lebih sulit. Operator sektor swasta mempunyai suatu tanggung-jawab untuk membangun kapasitas mereka sendiri guna menghadapi masalah-masalah ini secara konstruktif. RSPO menawarkan suatu dukungan kerangka kerja, yang berbasis multisektoral, dan Wilmar sudah mulai mengembangkan kapasitas dalam yang lebih besar untuk mempertanggung-jawabkan kebijaksanaannya, keuntungan kerjasama lokal dan penyelesaian sengketa yang proaktif. Sebagai tambahan, Kelompok Bank Dunia mendapat suatu kesempatan untuk membantu orang Indonesia mengatasi tantangan-tantangan struktural ini melalui sektor operasi umum maupun swasta dengan mengangkat isu-isu ini berdasarkan dasar yang sistematis.

1. LANGKAH-LANGKAH BERIKUTNYA

Selama penilaian, dengan pertolongan dari CSO lokal dan kelompok-kelompok komunitas, CAO telah mengkonformasikan bahwa memang ada sengketa-sengketa sosial yang berhubungan dengan dua perusahaan Wilmar di Sumatra. Dalam salah satu kasus ini, di Propinsi Jambi, suatu inisiatif dialog telah dikembangkan antara Asiatik Persada Co dari Wilmar dan Kelompok-kelompok komunitas SAD. Inisiatif ini dibantu oleh CSO Lokal Setara. Kasus yang lainnya di Riau, Cipta Riau Sarana Co dari Wilmar dan Komunitas Pangean sedang dalam proses negosiasi yang dimediasi oleh CSO Lokal Scale up.

Mengenai keluhan kedua yang dilaporkan oleh CSO yang prihatin, CAO mengenali bahwa perkebunan-perkebunan tambahan dan komunitas-komunitas telah diangkat sebagai daerah-daerah di mana akan terjadi sengketa sosial, berhubungan dengan perkebunan-perkebunan minyak kelapa sawit. Walaupun demikian, CAO tidak bisa mengkonformasikan sengketa-sengketa ini pada saat ini. Sebagai suatu langkah selanjutnya, CAO akan membawa kasus-kasus tidak confirm ini kepada Wilmar dan menganjurkan kedua belah pihak untuk memperjelas di mana sengketa/keprihatinan masih ada.

Berdasarkan penilaian ini dan respon dari IFC terhadap audit yang diprakarsai oleh CAO, usulan-usulan kami yang berhubungan dengan setiap hasil yang diinginkan disuarakan dalam keluhan tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil yang diinginkan	Tindakan yang diusulkan
1. Perubahan-perubahan cara bagaimana IFC memberlakukan garansi investasinya dan dukungan yang lain untuk perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dalam mata rantai pemasok minyak kelapa sawit.	Di bawah arahan Presiden, IFC telah mengumumkan suatu moratorium mengenai investasi minyak kelapa sawit yang baru sampai IFC menyiapkan suatu strategi untuk investasi dalam sektor yang mengakomodasikan resiko dan masalah-masalah yang diangkat oleh keluhan-keluhan ini – di antaranya factor-faktor yang lain.
2. Tindakan korektif terhadap staf IFC yang telah melanggar prosedur dan standar IFC.	Pusat perhatian dari CAO ialah akuntabilitas kelembagaan dan fungsinya adalah mempromosikan hasil-hasil sosial dan lingkungan yang sudah ditingkatkan. CAO tidak memberi komentar mengenai anggota staf secara perorangan.
3. <i>Suatu tinjauan kembali terhadap prosedur-prosedur operasional IFC untuk meyakinkan bahwa mereka menghormati hukum-hukum RSPO</i>	IFC telah setuju untuk meninjau kembali prosedur-prosedur operasionalnya dengan catatan sektor yang ada di bawah Tinjauan Standar Kinerja dan akan dilacak oleh CAO.
4. <i>Suatu tinjauan kembali yang mandiri dan parsipatif atas operasi-operasi dari perusahaan-perusahaan kelompok Wilmar di Indonesia</i>	Wilmar sedang akan mendapatkan sertifikat RSPO untuk memproduksi minyak kelapa sawit yang tahan lama, yang termasuk suatu syarat untuk ikut tinjauan lapangan. CAO mendorong pendekatan kolaborasi ini dan sangat mendukung perjanjian antara semua pihak untuk mencapai tujuan ini dalam kerangka kerja RSPO.
5. Rekomendasi reformasi praktek	IFC telah setuju untuk meninjau kembali prosedur-prosedur operasionalnya dengan catatan sektor yang ada di bawah Tinjauan Standar Kinerja dan akan dilacak oleh CAO.
6. <i>Aksi-aksi untuk meyakinkan bahwa Wilmar dan IFC mengambil tindakan perbaikan untuk meredakan atau membenahi kerugian rinci dan memberi kompensasi kepada mereka yang kehidupannya dan lingkungannya sudah dirusak tanpa bisa diperbaiki lagi.</i>	CAO akan terus bekerja dengan pihak-pihak lain untuk mencari pendekatan-pendekatan yang layak dan bisa diterima untuk mencapai hasil-hasil ini dan akan diikutsertakan dalam laporan-laporan kemajuan berkala dari bagian Ombudsman. Laporan-laporan ini akan tersedia untuk semua pihak dan akan dipantau oleh CAO.

Di ke dua kasus Jambi dan Riau, CAO telah menyetujui dengan semua pihak bahwa CAO akan berperan sebagai mentor dan pemantau untuk mendukung prosesnya serta mendapatkan hasilnya. CAO akan ikut berpartisipasi dengan memberi dukungan untuk membangun kapasitas dari semua pihak, terutamanya pemberi fasilitas CSO. Tujuannya ialah untuk meyakinkan bahwa pengalaman dan wawasan dari kasus-kasus Sambas akan bisa ditransfer secara efektif dan diadopsi oleh semua pihak di Sumatra. Selama ini, CAO telah bisa datang di ke lima rapat dialog di Pekanbaru – propinsi Riau. Di Jambi CAO telah menyelenggarakan 3 hari pembangunan kapasitas untuk Setara, 113 Kelompok SAD, dan Kelompok SAD Mat Ukup. CAO juga bertindak sebagai mentor untuk masing-masing pihak guna meyakinkan negosiasi mencapai penyelesaian.

Sehubungan dengan keprihatinan-keprihatinan struktural dan sistematis yang diangkat dalam keluhan ini, CAO menganjurkan IFC untuk mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi berikut ini:

1. Menilai/menganalisa peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang ada, yang dibutuhkan untuk pemberian tanah di Indonesia, dan membuat tuntunan kepada para sponsor guna meyakinkan bahwa investasi IFC mengikuti hukum-hukum di Indonesia, kriteria dan prinsip dari RSPO, serta Kebijakan IFC sendiri dan Standard Kinerjanya:
2. Menolong pembangunan kapasitas di antara para sponsor untuk memperbaiki hubungan-hubungan komunitas. Bebas sebelum persetujuan (sebagai bagian dari RSPO) dan pembangunan daerah yang ditingkatkan bermanfaat untuk mendapatkan kesempatan (ialah skema-skema dari petani plasma).
3. Bersama dengan IBRD, membantu orang Indonesia untuk menanggulangi tantangan-tantangan struktural ini dengan mengangkatnya ke pihak yang berwenang dalam sektor umum maupun swasta.

CAO menantikan hal-hal tersebut di atas untuk ditindak-lanjuti dalam laporan-laporan berikutnya.